

EVALUASI PENCATATAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN SAK EMKM PADA UMKM DI KABUPATEN MAJENE

*EVALUATION OF RECORDING AND PRESENTATION OF FINANCIAL REPORTS
BASED ON EMKM SAK IN MSMEs IN MAJENE REGENCY*

Sari Fatimah Mus^{1*}, Sri Amalia Edy², Sufyan Amirullah³, Ahmad Mansur⁴

Universitas Sulawesi Barat, Indonesia

*Email Correspondence: sari.fatimahmus@unsulbar.ac.id

Abstract

This research explores the compliance of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Majene Regency with the Financial Accounting Standards for Micro, Small, and Medium Entities (SAK EMKM) in their bookkeeping and financial reporting practices. The study's primary focus is to analyze the level of understanding and implementation of these accounting standards among MSME actors. Employing a case study approach, data was collected through questionnaires and in-depth interviews with several MSMEs within the study area. Research findings reveal significant variations in the alignment of MSME accounting practices with SAK EMKM. Some MSMEs have managed their financial records and presented reports reasonably well, although not yet fully adhering to SAK EMKM principles. However, other groups still demonstrate limited understanding and optimal implementation of these standards. These results highlight the urgency of improving financial literacy and accounting capabilities among MSMEs. Therefore, this study recommends intensifying structured training and mentoring programs for MSMEs. The objective is to encourage the preparation of more accurate and transparent financial statements, which in turn will support more strategic business decision-making and the sustainable improvement of MSMEs' financial performance.

Keywords: Recording, Reporting, SAK EMKM, Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs).

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi kepatuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Majene terhadap Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) dalam praktik pembukuan dan pelaporan keuangan mereka. Fokus utama studi adalah menganalisis tingkat pemahaman dan implementasi standar akuntansi tersebut di kalangan pelaku UMKM. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dan wawancara mendalam kepada beberapa UMKM di wilayah studi. Temuan penelitian menunjukkan variasi signifikan dalam keselarasan praktik akuntansi UMKM dengan SAK EMKM. Sebagian UMKM telah mengelola catatan keuangan dan menyajikan laporan dengan cukup baik, meskipun belum sepenuhnya memenuhi kaidah SAK EMKM. Namun, kelompok lainnya masih menunjukkan keterbatasan pemahaman dan implementasi optimal terhadap standar ini. Hasil ini menyoroti urgensi peningkatan literasi keuangan dan kapabilitas akuntansi UMKM. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan intensitas pelatihan dan pendampingan yang terstruktur bagi UMKM. Tujuannya adalah untuk mendorong penyusunan laporan keuangan yang lebih akurat dan transparan, yang pada gilirannya akan mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih strategis dan peningkatan kinerja finansial UMKM secara berkelanjutan.

Kata kunci: Pencatatan, Pelaporan, SAK EMKM, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar fundamental dalam struktur perekonomian suatu negara, khususnya di Indonesia. Sektor ini secara langsung

berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat, terutama di segmen menengah ke bawah. Dinamika ekonomi yang didorong oleh UMKM tidak hanya membuka peluang kerja baru bagi angkatan kerja yang belum terserap, tetapi juga berperan vital dalam menurunkan tingkat pengangguran nasional. Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2024, jumlah UMKM di Indonesia diperkirakan melampaui 65 juta unit, tersebar luas di berbagai sektor esensial seperti kuliner, fesyen, kerajinan tangan, hingga teknologi digital. Fenomena ini menegaskan posisi strategis UMKM sebagai motor penggerak ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Kontribusi UMKM bagi makroekonomi Indonesia tidak dapat dipandang remeh. Sektor ini tercatat menyumbang sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, sebuah angka yang mengindikasikan besarnya aktivitas ekonomi yang dihasilkan. Lebih lanjut, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 101,72 juta orang, yang merepresentasikan sekitar 97,3% dari total tenaga kerja di Indonesia. Angka-angka ini secara jelas menggambarkan kapasitas UMKM dalam menyediakan mata pencarian dan menopang kesejahteraan masyarakat. Perkembangan UMKM dari tahun ke tahun juga konsisten menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan, mencerminkan adaptabilitas dan resiliensi sektor ini dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.

Meskipun demikian, pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan tidak terlepas dari beragam tantangan internal yang kerap menghambat kemajuan mereka. Salah satu kendala krusial yang dihadapi wirausahawan UMKM adalah manajemen keuangan. Pengelolaan dana yang efektif adalah fondasi keberhasilan atau kegagalan suatu usaha. Dalam konteks ini, penerapan praktik akuntansi yang memadai menjadi solusi praktis dan esensial. Akuntansi memungkinkan UMKM untuk memperoleh informasi keuangan yang vital, yang krusial untuk operasional dan pengambilan keputusan. Pencatatan akuntansi yang akurat harus sejalan dengan setiap transaksi yang terjadi dan didasarkan pada standar akuntansi yang berlaku, mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, yang merupakan dasar penyusunan laporan keuangan yang andal.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara idealisme akuntansi dan implementasi di kalangan UMKM. Banyak pelaku UMKM masih menghadapi kesulitan dalam menyelenggarakan pembukuan yang komprehensif. Keterbatasan pengetahuan tentang ilmu akuntansi, persepsi bahwa proses akuntansi itu rumit, serta anggapan bahwa laporan keuangan kurang relevan bagi operasional sehari-hari, seringkali menjadi hambatan utama. Fenomena ini diperparah dengan minimnya kesadaran akan pentingnya pencatatan akuntansi. Padahal, aspek keuangan adalah inti dari pengelolaan usaha; pengelolaan yang tidak terstruktur atau tidak efisien dapat memicu gejolak finansial serius, bahkan berujung pada kebangkrutan atau kegagalan usaha.

Sejumlah penelitian terdahulu mengonfirmasi adanya permasalahan serupa terkait implementasi akuntansi pada UMKM. Sebagai contoh, studi oleh Savitri (2018) pada UMKM di Semarang mengungkapkan bahwa pencatatan akuntansi belum maksimal karena persepsi pemilik usaha yang menganggap akuntansi rumit dan membutuhkan biaya

tambahan untuk mempekerjakan ahli. Senada dengan itu, Rais (2019) menemukan bahwa penerapan akuntansi pada UMKM sektor perdagangan masih bersifat sederhana, terutama disebabkan oleh faktor pendidikan yang rendah dalam pengetahuan akuntansi serta kurangnya kesadaran akan signifikansi informasi akuntansi. Temuan-temuan ini menegaskan bahwa masalah pemahaman dan implementasi akuntansi pada UMKM merupakan isu yang bersifat sistemik dan memerlukan perhatian khusus.

Dalam konteks lokal, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, menunjukkan pertumbuhan UMKM yang cukup pesat. Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene tahun 2023 mencatat sebanyak 2.413 unit UMKM aktif, dengan ribuan lainnya merupakan binaan Dinas Koperindag dan Rumah BUMN. Perkembangan ini mengindikasikan peningkatan kebutuhan UMKM akan akses pendanaan dari bank atau lembaga keuangan lainnya, yang umumnya mensyaratkan laporan keuangan untuk penilaian kelayakan kredit. Oleh karena itu, penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) yang tepat menjadi krusial untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan UMKM. Meskipun demikian, observasi awal menunjukkan bahwa banyak UMKM di Majene belum sepenuhnya memahami atau mengimplementasikan standar ini secara optimal.

Kesenjangan antara kebutuhan akan praktik akuntansi yang baik dan realita implementasinya di lapangan, khususnya di Kabupaten Majene, memicu urgensi penelitian ini. Evaluasi menyeluruh terhadap praktik pencatatan dan penyajian laporan keuangan di kalangan UMKM menjadi esensial untuk mengukur sejauh mana pemahaman dan implementasi SAK EMKM telah tercapai. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat teridentifikasi kendala-kendala spesifik yang dihadapi UMKM dalam menerapkan standar tersebut. Hasil dari studi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengembangkan program pelatihan dan pendampingan yang lebih efektif, guna mendukung UMKM dalam menyusun laporan keuangan yang akurat, transparan, dan mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih informatif dan berkelanjutan

TINJAUAN PUSTAKA

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Bab 1 pasal 1 untuk definisi UMKM yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Pengertian EMKM dalam SAK EMKM (2016) entitas mikro, kecil, dan menengah adalah sebagai berikut : entitas mikro, kecil, dan menengah adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang memenuhi definisi dari kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya-tidaknya selama dua tahun berturut-turut.

Adapun kriteria UMKM menurut UU No. 20 Tahun 2008 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1. Kriteria UMKM

No	Uraian	Aset	Omzet
1	Usaha Mikro	Maksimum Rp. 50 Juta	Maksimum Rp.300 Juta
2	Usaha Kecil	>Rp.50 Juta – 500 Juta	>Rp.300 Juta – 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	>Rp.500 Juta - < 1 Miliar	>Rp. 2,5 Miliar – 50 Miliar

Akuntansi

Akuntansi merupakan disiplin ilmu yang fundamental dalam ekosistem bisnis modern dan juga relevan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Esensinya terletak pada kemampuannya untuk secara sistematis mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi yang krusial. Peran akuntansi melampaui sekadar teknis pencatatan, sebab ia juga memiliki dimensi sosial dan moral yang signifikan, mempengaruhi serta dipengaruhi oleh nilai-nilai dan etika masyarakat (Tsahuridu et al., 2020; Carnegie, 2021). Keberagaman model dan kegunaan akuntansi mencerminkan sifatnya yang adaptif, dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi spesifik dari beragam pengguna, mulai dari pengelola internal hingga pihak eksternal seperti investor dan regulator. Dengan demikian, akuntansi bukan hanya alat perhitungan, melainkan fondasi bagi transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan yang rasional dalam berbagai skala organisasi.

Secara umum, akuntansi didefinisikan sebagai suatu proses terstruktur untuk mengidentifikasi transaksi keuangan, mengukurnya dalam satuan moneter, dan kemudian mengkomunikasikan informasi tersebut kepada para pemangku kepentingan. Informasi ini esensial untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat, baik bagi manajer internal dalam perencanaan strategis, pemilik untuk evaluasi kinerja, investor dalam alokasi modal, maupun pihak eksternal lainnya yang bergantung pada data finansial yang akurat (Triani, 2023; Kumar, 2019). Lebih dari sekadar kumpulan angka, akuntansi juga dipandang sebagai praktik sosial dan moral, di mana standar dan praktik yang diterapkan mencerminkan serta membentuk nilai-nilai yang berlaku dalam suatu komunitas atau entitas (Tsahuridu et al.,

2020; Carnegie, 2021). Di tingkat individu dan organisasi, akuntansi memfasilitasi pengelolaan keuangan yang efisien, analisis data yang mendalam, dan perumusan keputusan yang bijaksana (Damayanti et al., 2024).

Akuntansi memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya sebagai sistem informasi yang unik. Pertama, melibatkan pencatatan dan pengukuran transaksi keuangan secara sistematis, yang merupakan fondasi dari seluruh proses (Triani, 2023; Kumar, 2019). Kedua, akuntansi bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan (financial statements) yang komprehensif, memberikan gambaran holistik mengenai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas (Kumar, 2019; Sonnad, 2019). Ketiga, operasinya sangat berbasis pada aturan dan standar akuntansi yang berlaku umum, memastikan konsistensi dan komparabilitas informasi (Poyda-Nosyk & Markush, 2023). Keempat, akuntansi bersifat siklus, di mana prosesnya berjalan secara berulang dari awal hingga akhir periode akuntansi (Kumar, 2019). Terakhir, akuntansi menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas yang tinggi, terus berkembang mengikuti dinamika lingkungan bisnis, sosial, dan perubahan regulasi yang terjadi (Poyda-Nosyk & Markush, 2023; Tsahuridu et al., 2020).

Struktur akuntansi yang kompleks melahirkan berbagai jenis yang memiliki fokus dan pengguna utama yang berbeda. Akuntansi keuangan berorientasi pada penyusunan laporan untuk pihak eksternal seperti investor dan kreditur, dengan standar yang ketat dan informasi yang bersifat historis. Berbeda dengan itu, akuntansi manajemen menyediakan informasi yang lebih fleksibel dan berorientasi masa depan, khusus dirancang untuk kebutuhan manajer internal dalam pengambilan keputusan operasional dan strategis. Di sisi lain, akuntansi sosial menitikberatkan pada nilai-nilai non-keuangan dan akuntabilitas kepada masyarakat luas, menyoroti dampak sosial dan lingkungan dari suatu entitas. Keberadaan model akuntansi global, seperti Model Kontinental yang berfokus pada kebutuhan negara dan regulasi ketat, serta Model Anglo-Amerika yang lebih berorientasi pada investor dan pasar modal, menunjukkan keragaman pendekatan dalam praktik akuntansi global (Poyda-Nosyk & Markush, 2023; Triani, 2023; Retolaza & San-Jose, 2021).

Selain dua model utama, dunia akuntansi juga mengenal pendekatan khusus seperti Model Islam, yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam praktik keuangannya, menunjukkan kepatuhan agama sebagai landasan (Retolaza & San-Jose, 2021). Ada pula Model Amerika Selatan yang cenderung lebih sederhana dan sangat adaptif terhadap kondisi inflasi tinggi serta regulasi perpajakan yang ketat, seringkali berfokus pada kebutuhan pemerintah (Poyda-Nosyk & Markush, 2023). Keragaman model ini menunjukkan bagaimana akuntansi disesuaikan dengan konteks ekonomi, hukum, dan budaya setempat. Terlepas dari model atau jenisnya, kegunaan akuntansi secara fundamental adalah mendukung pengambilan keputusan yang informasional (Triani, 2023; Kumar, 2019). Informasi akuntansi memungkinkan organisasi untuk melakukan perencanaan dan pengendalian yang efektif, mengevaluasi kinerja, serta mengelola biaya secara efisien (Kumar, 2019; Damayanti et al., 2024).

Selain fungsinya dalam perencanaan dan pengendalian, akuntansi juga memiliki peran krusial dalam menciptakan akuntabilitas dan transparansi. Dengan menyediakan informasi keuangan yang terverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan, akuntansi memastikan

bahwa pihak internal dan eksternal memiliki gambaran yang jelas tentang operasi dan kinerja finansial suatu entitas (Tсахuridu et al., 2020; Retolaza & San-Jose, 2021). Hal ini sangat penting untuk membangun kepercayaan dan memfasilitasi hubungan yang sehat antara organisasi dan pemangku kepentingannya. Lebih jauh, dampak akuntansi meluas hingga ke kehidupan sehari-hari individu. Pemahaman dasar akuntansi memberdayakan setiap orang untuk mengelola keuangan pribadi, membuat keputusan investasi yang lebih cerdas, dan merencanakan masa depan finansial dengan lebih efektif (Kumar, 2019; Damayanti et al., 2024). Dengan demikian, akuntansi adalah sistem yang kompleks namun esensial, berfungsi sebagai pilar utama dalam pengambilan keputusan ekonomi, akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan yang efektif di berbagai tingkatan.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)

SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang berdiri sendiri yang dapat digunakan oleh entitas yang memenuhi definisi entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan sebagaimana yang diatur dalam SAK ETAP dan karakteristik dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). SAK EMKM secara eksplisit mendeskripsikan konsep entitas bisnis sebagai salah satu asumsi dasarnya dan oleh karena itu untuk dapat menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, entitas harus dapat memisahkan kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan dan hasil usaha entitas tersebut, dan antara suatu usaha/entitas dengan usaha/entitas lainnya.

Jika dibandingkan dengan SAK lainnya, SAK EMKM merupakan standar yang dibuat sederhana karena mengatur transaksi umum yang dilakukan oleh EMKM dan dasar pengukurannya murni menggunakan biaya historis sehingga EMKM cukup mencatat aset dan liabilitasnya sebesar biaya perolehannya. Entitas yang memenuhi persyaratan menggunakan SAK EMKM ini tetap perlu mempertimbangkan apakah ketentuan yang diatur dalam SAK EMKM ini telah sesuai dan memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas tersebut. Oleh karena itu, entitas perlu mempertimbangkan kerangka pelaporan keuangan yang akan diterapkan, apakah berdasarkan SAK EMKM atau SAK lainnya, dengan memperhatikan kemudahan yang ditawarkan dalam SAK EMKM, dan kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan entitas tersebut.

Entitas menyusun laporan keuangan dengan menggunakan dasar akrual. dalam dasar akrual akun-akun diakui sebagai aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk masing-masing akun-akun tersebut. Menurut IAI dalam SAK EMKM (2016) laporan keuangan entitas meliputi:

1. laporan posisi keuangan akhir periode
2. laporan laba rugi selama periode
3. catatan atas laporan keuangan yang berisi tambahan dan rincian akun-akun tertentu yang relevan.

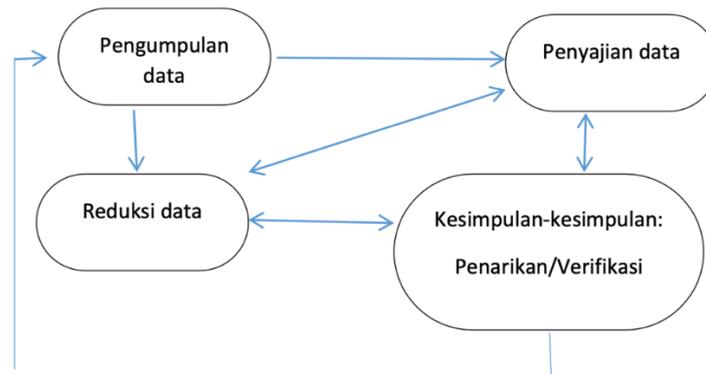
METODE

Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu yang terstruktur, dimulai pada bulan Desember 2024 dan berakhir pada Februari 2025. Lokasi penelitian difokuskan pada Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) skala Kecil dan Menengah yang beroperasi di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada signifikansi peran UMKM dalam perekonomian lokal serta kebutuhan untuk memahami praktik akuntansi mereka di konteks geografis spesifik tersebut. Metode yang diadopsi adalah penelitian kualitatif, dirancang khusus untuk mengumpulkan data yang komprehensif guna menjawab pertanyaan terkait kondisi terkini subjek penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendeskripsikan secara akurat fakta-fakta dan karakteristik objek studi, tanpa bertujuan untuk membuat prediksi atau mencari solusi langsung terhadap permasalahan yang ada. Desain penelitian secara spesifik mengintegrasikan Participatory Action Research (PAR), di mana peneliti dan komunitas UMKM membentuk kolaborasi sosial aktif untuk mengidentifikasi masalah dan mengambil tindakan nyata demi mencapai kondisi yang diharapkan, memastikan relevansi dan kebermanfaatan hasil penelitian bagi para partisipan.

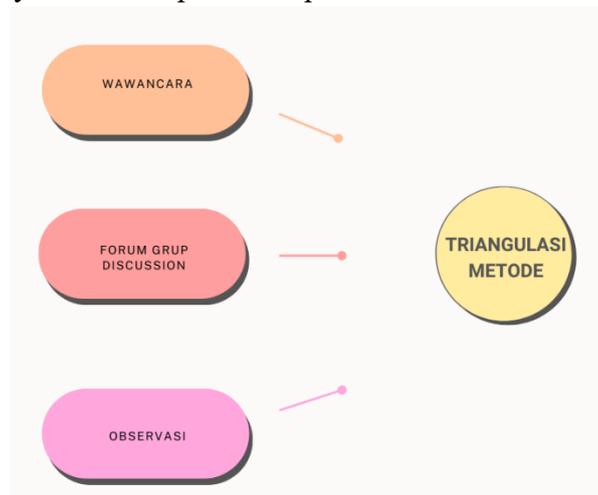
Prosedur penelitian dalam kerangka PAR ini diawali dengan tahapan Identifikasi Pertanyaan Penelitian. Peneliti berkolaborasi dengan pelaku UMKM untuk mengidentifikasi permasalahan pengelolaan keuangan yang dianggap penting dan relevan oleh kedua belah pihak. Keterlibatan aktif partisipan pada tahap ini krusial untuk memastikan bahwa isu yang diangkat bukan hanya menarik bagi peneliti, melainkan juga memiliki bobot urgensi bagi para pemangku kepentingan UMKM itu sendiri. Selanjutnya, tahapan Pengumpulan Informasi untuk Menjawab Pertanyaan melibatkan partisipan dalam pencarian data terkait masalah yang telah teridentifikasi. Informasi ini dapat berupa data keuangan yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemilik atau pekerja UMKM. Setiap kepingan data yang terkumpul berpotensi untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menjadi dasar pemecahan masalah yang telah dirumuskan secara kolektif, mencerminkan sifat partisipatif dari pendekatan PAR yang diterapkan.

Tahap Analisis dan Interpretasi Informasi dilakukan setelah data terkumpul, di mana pengolahan data kualitatif ini berfokus pada upaya reduksi data—suatu proses penyimpulan dan pemilahan data ke dalam unit konsep, kategori, dan tema tertentu, sebagaimana ditekankan dalam metode analisis data kualitatif (Rijali, 2018). Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk menginterpretasikan makna dari hasil analisis dan memberikan penjelasan mendalam terhadap temuan yang diperoleh. Setelah analisis selesai, tahapan Berbagi Hasil dengan Partisipan menjadi krusial. Peneliti memiliki tanggung jawab untuk mengkomunikasikan hasil analisis ini kepada pelaku UMKM, baik secara formal maupun non-formal. Komunikasi ini dapat berbentuk penyampaian laporan hasil analisis data dan pemberian penjelasan langsung, memungkinkan partisipan untuk memahami implikasi temuan dan mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan.



Gambar 1. Proses Analisis Data

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini mengimplementasikan triangulasi metode, yaitu upaya memeriksa keabsahan data melalui penggunaan lebih dari satu teknik pengumpulan data yang sama, seperti kombinasi kuesioner dan wawancara, untuk meningkatkan kepercayaan terhadap temuan penelitian.:



Gambar 2. Proses Validitas Data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Pemahaman UMKM terhadap SAK EMKM

Pemahaman adalah kemampuan seseorang dalam memahami dan memahami sesuatu. Memahami berarti mengetahui sesuatu dan mampu melihatnya dari berbagai aspek. Tingkat pemahaman SAK EMKM merupakan sejauh mana pemangku kepentingan UMKM memahami penerapan SAK EMKM baik dari segi pengukuran, asumsi yang mendasari, dan penyajian laporan keuangan (Ndururu dkk, 2024). Dapat dikatakan bahwa para pemangku kepentingan UMKM memahami asumsi dasar akrual, kelangsungan usaha dan konsep unit usaha dalam penyusunan laporan keuangan.

Tujuan laporan keuangan menurut SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang relevan, andal, dan sederhana bagi para pengguna laporan keuangan, khususnya para pelaku UMKM

dan pihak-pihak yang berkepentingan terkait. Laporan keuangan disusun agar dapat membantu pemilik usaha dalam mengambil keputusan bisnis, memantau kondisi keuangan, serta memudahkan pelaporan kepada pihak eksternal seperti kreditur, investor, atau institusi keuangan lainnya.

Di Kabupaten Majene, temuan menunjukkan sebagian besar pelaku UMKM belum mengenal atau memahami SAK EMKM secara memadai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 20 informan pemilik UMKM hanya 6 yang mengetahui terkait dengan SAK EMKM namun tidak menerapkan hal tersebut. Alasan pelaku UMKM tidak pernah mendengar atau merasa asing dengan istilah akuntansi dan SAK EMKM, alasan lain yakni mereka cenderung lebih fokus pada aktivitas operasional dan pemasaran produk dibandingkan mencatat dan menyusun laporan keuangan selain itu menghadapi keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya sehingga sulit untuk melakukan pencatatan keuangan yang detail dan sesuai standar. Hal ini membuat aspek pencatatan keuangan sering diabaikan dan menyebabkan laporan keuangan mereka masih banyak yang dibuat secara manual, sederhana, atau bahkan belum ada. alasan sederhana tingkat pemahaman yang rendah ini menghambat kemampuan UMKM dalam menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan bermanfaat untuk pengembangan usaha. Hasil wawancara dengan pelaku UMKM menjelaskan bahwa :

“Saya pernah dengar tentang SAK EMKM dari teman yang ikut pelatihan, tapi saya sendiri belum tahu itu sebenarnya apa dan bagaimana cara menerapkannya.” (UMKM-01)

"Belum tau saya terkait dengan pelaporan keuangan apalagi standar untuk UMKM, kami kadan melakukan pencatatan tapi kadang juga tidak" (UMKM-02)

Sejalan dengan hasil penelitian ini, Utari, Harahap dan Syahbudi (2022) menjelaskan informasi yang beredar mengenai SAK EMKM begitu jarang terdengar. Minimnya pengetahuan dasar mengenai standar ini membuat para pelaku UMKM yang mengetahui hanya 32 pelaku UMKM, yang mempelajari SAK EMKM, juga hanya 16%. Akan tetapi, meskipun banyak dari para pelaku UMKM tidak mengenal SAK EMKM, banyak informan juga mengetahui tentang akuntansi dan pencatatan akuntansi. Hal yang sama juga ditemukan oleh Imani (2023) bahwa masih banyak UMKM di Indonesia yang tidak membuat atau menggunakan informasi akuntansi untuk menjalankan usahanya. pemilik usaha kecil tidak memiliki pengetahuan akuntansi dan banyak dari mereka tidak memahami pentingnya akuntansi bagi kelangsungan usaha dan kesuksesan bisnis.

Pencatatan Keuangan UMKM

Pencatatan keuangan UMKM adalah proses pencatatan semua transaksi keuangan yang terjadi dalam usaha mikro, kecil, dan menengah secara sistematis, teratur, dan akurat sesuai dengan kebutuhan usaha dan standar pencatatan yang berlaku seperti SAK EMKM. Tujuan utama pencatatan keuangan ini adalah agar pemilik UMKM dapat mengetahui kondisi keuangan usahanya, memantau arus kas, membuat laporan keuangan yang akurat, serta mendukung pengambilan keputusan bisnis yang tepat.

Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM di Kabupaten Majene tidak melakukan pencatatan akuntansi baik secara sederhana, Mayoritas UMKM masih

menggunakan metode pencatatan manual, baik dalam bentuk buku tulis, catatan harian, maupun aplikasi sederhana seperti Microsoft Excel. Pencatatan umumnya hanya terbatas pada transaksi kas masuk dan kas keluar, tanpa dilakukan pengelompokan akun berdasarkan jenisnya (misalnya: pendapatan, biaya operasional, aset, dan kewajiban).

Sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan (UMKM-03, UMKM-06 dan UMKM-20) , pemilik usaha kuliner:

“Saya hanya catat pemasukan dan pengeluaran di buku tulis. Kalau sudah akhir bulan, baru dihitung kira-kira untung atau rugi.”

“Kalau usaha kecil seperti kami ini, rasanya tidak perlu buat laporan keuangan. Yang penting uang cukup dan usaha jalan.”

"Melakukan pencatatan keuangan itu membuat saya tidak mendapatkan waktu istirahat yang cukup karena kegiatan dan waktu yang belum bisa diatur dengan baik"

SAK EMKM menyarankan pencatatan berbasis akrual dengan pengelompokan akun yang mencerminkan posisi dan kinerja keuangan secara wajar. Namun, dari hasil observasi dokumen keuangan UMKM, hampir seluruh sampel tidak menyusun jurnal transaksi, buku besar, atau neraca saldo. Bahkan, tidak ditemukan bukti adanya pencatatan aset tetap atau piutang usaha secara terstruktur.

Adapun pelaku UMKM yang rutin melakukan pencatatan hanya ada 3 dengan beberapa temuan utama sebagai berikut:

a. Praktik Pencatatan yang Masih Manual dan Sederhana

Mayoritas UMKM masih menggunakan cara pencatatan manual menggunakan buku kas atau catatan harian tanpa menggunakan perangkat lunak atau metode digital. Para pelaku UMKM di Kabupaten Majene yang melakukan pencatatan hanya mencatat rincian pengeluaran dan penerimaan dan tidak mengikuti format dan prinsip yang ditetapkan dalam SAK EMKM. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan teknis dan akses terhadap teknologi.

b. Kurangnya Konsistensi dan Kedalaman Pencatatan

UMKM di Kabupaten Majene yang melakukan pencatatan dengan cara yang tidak rutin dan kurang detail, sehingga informasi keuangan yang diperoleh kurang lengkap dan sering kali tidak sistematis. Catatan hanya sebatas arus kas masuk dan keluar tanpa memuat elemen-elemen laporan keuangan yang lengkap.

c. Pemahaman yang Terbatas tentang Prinsip Akuntansi

Pelaku UMKM di Kabupaten Majene umumnya belum memahami prinsip dasar akuntansi seperti pencatatan berdasarkan asas pencatatan berpasangan (debit dan kredit), pengelompokan akun, atau penyusunan laporan keuangan standar. Ini menjadi kendala dalam pencatatan yang benar dan sesuai standar.

d. Kendala Pendidikan dan Sosialisasi

Keterbatasan pelatihan dan sosialisasi terkait pencatatan akuntansi dan standar keuangan menjadi faktor utama rendahnya kualitas pencatatan. Banyak pelaku UMKM tidak mengetahui pentingnya pencatatan yang baik bagi pengelolaan usaha dan pengembangan bisnis.

Penyajian Laporan Keuangan UMKM

Laporan keuangan menurut SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah penyajian informasi keuangan yang disusun secara sederhana dan mudah dipahami oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Intinya, laporan keuangan menurut SAK EMKM harus mencakup unsur utama seperti laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas, dengan penyajian yang ringkas dan relevan untuk kebutuhan pengambilan keputusan pelaku usaha.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dari keseluruhan informan, hanya sebagian kecil yang menyusun laporan keuangan secara lengkap. Rata-rata pelaku UMKM hanya menyusun laporan laba rugi secara sederhana yang berisi pendapatan dan pengeluaran rutin setiap bulan. Adapun penyusunan laporan posisi keuangan (neraca) dan catatan atas laporan keuangan belum dilakukan secara sistematis.

Seorang informan, pemilik usaha konveksi (UMKM-05), menyatakan:

“Kami mencatat pemasukan dan pengeluaran setiap hari, tapi tidak pernah buat neraca atau laporan keuangan lengkap. Selama ini cukup tahu untung ruginya saja.”

Hal ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM masih memandang pencatatan keuangan sebagai alat pengendali kas, bukan sebagai bagian dari kewajiban pelaporan yang sesuai dengan standar akuntansi.

Format laporan yang digunakan oleh sebagian besar informan tidak mengikuti struktur standar SAK EMKM. Tidak ditemukan pemisahan yang jelas antara aset dan liabilitas, serta tidak adanya penyajian ekuitas pemilik. Penyajian laporan lebih bersifat deskriptif dan informal, menggunakan catatan manual di buku tulis atau aplikasi sederhana seperti Microsoft Excel.

Dalam observasi terhadap dokumen milik salah satu UMKM (UMKM-09), ditemukan bahwa laporan laba rugi hanya memuat dua kolom yaitu “Pendapatan” dan “Pengeluaran”, tanpa adanya penjabaran kategori akun secara akuntansi. Pemilik UMKM mengatakan bahwa :

"saya tidak melakukan itu, Alhamdulillah usaha saya tetap menunjukkan performa yang cukup baik, namun tentu saja ada tantangan tersendiri dalam menghadapi ketidakpastian dalam pengelolaan keuangan apa lagi untuk akses pembiayaan di bank."

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pelaku UMKM Meskipun penerapan SAK EMKM masih minim, sebagian besar pelaku UMKM menunjukkan kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya memiliki laporan keuangan. Hal ini ditunjukkan dengan keinginan mereka untuk bisa mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan, yang mensyaratkan adanya laporan keuangan yang akurat dan terstandar. Hal ini relevan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa penerapan SAK EMKM masih menjadi tantangan besar di tingkat pelaku UMKM, terutama di daerah (Savitri dan Sifuddin, 2018., Arip, Karim dan Kartikasari, 2023., Imani, 2023).

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi pencatatan dan penyajian laporan keuangan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Majene, disimpulkan bahwa tingkat pemahaman dan kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) masih berada pada kategori rendah. Ini terlihat dari fakta bahwa SAK EMKM belum dijadikan acuan utama dalam praktik pembukuan maupun penyusunan laporan finansial. Dampak langsung dari keterbatasan pemahaman ini adalah praktik pencatatan dan pelaporan yang tidak memenuhi prinsip dasar akuntansi, seperti relevansi, keandalan, dan daya banding. Mayoritas UMKM hanya melakukan pencatatan transaksi kas harian secara sederhana dan kurang terstruktur, tanpa menerapkan klasifikasi akun yang memadai atau pemisahan tegas antara keuangan pribadi dan entitas usaha. Kondisi ini secara signifikan menghambat penyediaan informasi keuangan yang akurat dan komprehensif, sehingga memengaruhi kualitas pengambilan keputusan ekonomi oleh pemilik usaha, calon investor, maupun lembaga keuangan yang berpotensi memberikan dukungan finansial.

Lebih lanjut, analisis terhadap penyajian laporan keuangan menunjukkan bahwa UMKM di Kabupaten Majene belum menyusun laporan sesuai ketentuan SAK EMKM. Sebagian besar hanya mampu menyajikan laporan laba rugi dalam format yang sangat dasar, tanpa dilengkapi laporan posisi keuangan (neraca) atau catatan atas laporan keuangan yang merupakan komponen esensial menurut standar. Format dan substansi laporan yang dihasilkan sering kali tidak mengikuti struktur standar akuntansi, dan penggunaannya umumnya terbatas pada kepentingan internal semata, bukan untuk kebutuhan eksternal seperti pengajuan kredit atau pelaporan pajak. Situasi ini mengindikasikan adanya kesenjangan signifikan antara praktik akuntansi UMKM dan persyaratan standar akuntansi yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang terstruktur dan berkelanjutan, seperti program edukasi dan pendampingan, untuk meningkatkan kapabilitas UMKM dalam mengelola informasi keuangan mereka agar lebih akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, demi mendukung pertumbuhan bisnis yang lebih kokoh dan berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan, beberapa rekomendasi strategis diusulkan untuk meningkatkan kualitas pencatatan dan pelaporan keuangan UMKM di Kabupaten Majene. Bagi para pelaku UMKM, prioritas utama adalah peningkatan literasi keuangan dan pemahaman akuntansi dasar, khususnya yang relevan dengan prinsip-prinsip SAK EMKM. Hal ini esensial untuk membangun fondasi pencatatan yang akurat. Selain itu, pemisahan konsisten antara keuangan usaha dan pribadi sangat ditekankan guna memperoleh gambaran finansial yang jernih. Untuk mempermudah proses ini, UMKM dapat memanfaatkan aplikasi pencatatan keuangan sederhana yang tersedia luas, baik yang gratis maupun berbiaya rendah, sebagai langkah awal menuju penyusunan laporan keuangan yang lebih terstruktur dan informatif, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.

Pemerintah daerah dan dinas terkait memiliki peran krusial dalam mendukung peningkatan kapasitas UMKM. Disarankan agar penyelenggaraan pelatihan dan sosialisasi mengenai penerapan SAK EMKM dilakukan secara berkala dan terstruktur, menjangkau lebih banyak pelaku UMKM di seluruh wilayah Kabupaten Majene. Selain itu, pendampingan teknis secara langsung melalui program binaan UMKM perlu diintensifkan, memastikan UMKM mendapatkan bimbingan praktis dalam mengimplementasikan standar akuntansi. Penting juga untuk mendorong kemitraan strategis antara UMKM dengan lembaga pendidikan, seperti universitas atau politeknik setempat. Kemitraan ini dapat memfasilitasi pemberian bantuan teknis, praktik kerja lapangan mahasiswa, atau program pengabdian masyarakat yang fokus pada penyusunan laporan keuangan, sehingga tercipta ekosistem yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM dengan tata kelola finansial yang lebih profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, dkk., 2017. Pencatatan Akuntansi pada Usaha Peternakan Ayam Petelur (Studi Kasus Usaha Peternakan Ayam Petelur di Kecamatan Sugio Lamongan). *Majalah Ekonomi*: 23(1).
- Arifin, Chandra, dkk., 2012. Penerapan Akuntansi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *JMK* : 10(2).
- Arip, H., Karim, Kartikasari. 2023. Penerapan Sak Emkm Pada Umkm Di Kecamatan Pringgabaya. *Jurnal Risma*: 3(1).
- Carnegie, G. (2021). Accounting 101: redefining accounting for tomorrow. *Accounting Education*, 31, 615 - 628. <https://doi.org/10.1080/09639284.2021.2014915>
- Damayanti, S., Ayu, A., & Azim, M. (2024). The Importance of Understanding Internal Accounting in Everyday life. *Business Management*. <https://doi.org/10.58258/bisnis.v3i1.6563>
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2016. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah, Jakarta.
- Imani, A.S. 2023. Penerapan SAK EMKM Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *JKA : Jurnal Kendali Akuntansi* : 1(4), 89-94.
- Kumar, H. (2019). Financial Accounting and its Implications in Present Corporate World. *Journal of emerging technologies and innovative research*.
- Lune, H., & Berg, B. L. 2017. *Methods for the Social Sciences* (9th ed.). Edinburgh:Pearson.
- Poyda-Nosyk, N., & Markush, N. (2023). Comparative characteristics of accounting models. *Scientific Bulletin of Mukachevo State University Series "Economics"*. <https://doi.org/10.52566/msu-econ2.2023.21>
- Rais. 2019. Analisis Sistem Pencatatan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kota Baubau. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*: 2(1).
- Retolaza, J., & San-Jose, L. (2021). Understanding Social Accounting Based on Evidence. *SAGE Open*, 11. <https://doi.org/10.1177/21582440211003865>
- Rijali. 2018. Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah* : 17(33).

- Savitri, R.V., Saifuddin. 2018. Pencatatan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Pada Umkm Mr. Pelangi Semarang). *Majalah Ilmiah* : 16(2).
- Shivarajappa, D. (2020). Financial Accounting and its Implications in Present Corporate World. *Journal of emerging technologies and innovative research*.
- Sonnad, M. (2019). Financial Accounting and its Implications in Present Corporate World. *Journal of emerging technologies and innovative research*.
- Sulistyowati. Y. 2017. Listing Registration Of Sme Financial Reporting (A Case Studi In Malang). *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*: 5(2).
- Tsahuridu, E., Carnegie, G., & Parker, L. (2020). It's 2020: What is Accounting Today?. *Australian Accounting Review*. <https://doi.org/10.1111/auar.12325>
- Triani, N. (2023). Introduction to Financial Accounting. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4512267>
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2008. Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (<http://www.bi.go.id>).
- Utari, R., Harahap, I., & Syahbudi, M. 2022. Penerapan SAK EMKM Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: Studi Kasus UMKM Di Kota Tanjungbalai. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* :10(3), 491–498.